

Pengembangan Industri Kecil

Oleh : H. Wiryosumarto

The logo for BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) features the letters 'BPPT' in a bold, sans-serif font. The letters are primarily grey, with the 'B' and 'P' having red and blue accents at their bases. The text is overlaid on a light blue, stylized oval shape that resembles a planet's orbit or a dynamic path.

INTISARI

Analisa berdasarkan pertumbuhan industri kecil yang dikaitkan dengan misi industri dalam Pembangunan (kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi/nilai tambah, struktur industri/keterkaitan, tinggal landas/produktivitas dan kestabilan nasional/strategi) menunjukkan bahwa: kelompok industri kimia & bahan bangunan dan kelompok industri logam (yang sudah siap) perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan menjadi industri kecil modern yang menerapkan teknologi maju yang dapat tumbuh menjadi industri menengah/ besar.

Jaringan pembinaan yang ditunjang dengan Unit Pelaksanaan Teknis/Industri (UPT/UPI) sudah cukup tangguh. Untuk meningkatkan kemampuan pembinaan UPT/UPI perlu ditingkatkan kemampuannya dalam menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip alih teknologi, manajemen, perbankan dan evaluasi pasar.

Untuk memperbesar kemampuan pelayanan pembinaan, UPT/UPI perlu bekerjasama yang erat dengan kelompok pengusaha, perbankan, unit-unit latihan kerja, unit-unit penelitian dan perguruan tinggi setempat.

Dipresentasikan Dalam Rangka Diskusi Pada Pameran Produksi Indonesia 1985.

PENDAHULUAN

Makalah ini disusun dalam rangka Pameran Produksi Indonesia tahun 1985, yang ditujukan untuk mendapatkan cakrawala baru dalam membina dan mengembangkan industri kecil di negara kita. Dalam menyusun makalah ini dimana waktunya sangat singkat, maka dengan sendirinya yang dapat tergalai hanya bagian yang sangat kecil sekali. Oleh karena itu keikutsertaan dalam diskusi dan masukan-masukan dari para peserta sangat diharapkan.

Pola pemikiran dari penulis dalam menyusun makalah ini adalah dimulai dari beberapa kebijaksanaan Departemen Perindustrian yang akhirnya digunakan untuk menyusun sasaran pembinaan dan kemudian diikuti dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembinaan serta keadaan industri kecil pada waktu ini. Dengan sendirinya semua informasi dan data yang berhubungan hal-hal di atas bersumber dari Departemen Perindustrian Bagian berikutnya adalah suatu analisa untuk menentukan urutan prioritas pembinaan/pengembangan bagi kelompok-kelompok industri (kecil) berdasarkan misi dari Industri Kecil itu sendiri dan akhirnya dikemukakan arah dari pembinaan yang didasarkan atas perkiraan volume pasar dan keterkaitannya dengan Sektor Industri/ekonomi lainnya dan hubungannya dengan misi yang diemban.

Pada pembahasan akhir, setelah penentuan prioritas dan arah pembinaan/pengembangan maka dicoba menggali cara peningkatan sarana yang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan.

BEBERAPA KEBIJAKSANAAN DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam Repelita IV Pembangunan Industri yang digunakan sebagai dasar penentuan sasaran dalam makalah ini ada dua jenis/kelompok yaitu kebijaksanaan pengelompokan industri nasional dan beberapa kebijaksanaan dalam pembangunan industri kecil.

Pengelompokan Industri Nasional.

Berdasarkan misi dan cara pembinaan & pengembangan yang direncanakan, Pemerintah c.c. Departemen Perindustrian telah mengambil kebijaksanaan dalam mengelompokan industri nasional sebagai terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Pengelompokan Industri Nasional

Kelompok Industri	Missi	Teknologi	Karya/Modal
1. Dasar – industri Mesin dan Logam Dasar – industri Kimia Dasar	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Penguatan struktur	Maju dan teruji	Padat Modal
2. Hilir – Aneka industri	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Pemerataan	1. Maju dan teruji 2. Madya	Padat modal Padat karya
3. Industri Kecil/ Kerajinan	Pemerataan	1. Madya 2. Sederhana	Padat karya

Dengan kebijaksanaan di atas, dimana teknologi dan sifat padat karya/modal telah ditentukan, maka dengan sendirinya program pembinaan dan pengembangan serta pengaturan bagi setiap kelompok industri menjadi lebih mudah karena program untuk masing-masing dapat dipisahkan

Beberapa Kebijakan Umum dalam Membangun Industri Kecil.

Dalam melaksanakan pembangunan industri nasional, Pemerintah tetap berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu:

- Menghasilkan dampak yang nyata terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- Menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam kaitannya dengan trilogi di atas, beberapa kebijakan umum dalam pembangunan industri kecil telah diletakkan antara lain adalah:

- 1). Meningkatkan kemampuan Industri Kecil melalui pembinaan dan pengembangan usaha serta peningkatan *produktivitas* dan perbaikan mutu produksi sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang disertai dengan peningkatan pendapatan.
- 2). Peningkatan peranan Industri Kecil dalam memproduksi hasil-hasil industri yang ruang lingkup dan jangkauan pemasarannya luas, dan agar pengembangan industri besar dan menengah secara langsung merangsang pembangunan industri kecil.
- 3). Memperbaiki struktur usaha industri kecil ke arah yang kuat dan mempunyai daya tumbuh dengan peningkatan peranan keterkaitan industri

kecil dengan industri menengah dan besar terutama industri permesinan dan sektor produksi lainnya.

Kebijaksanaan di atas sekaligus menempatkan posisi industri kecil terhadap industri menengah dan besar dan kedudukan industri kecil dalam pembangunan.

KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL.

Industri Kecil mempunyai variasi yang luar biasa banyaknya, baik dalam jenisnya maupun dalam kemampuannya. Untuk tujuan pembinaan dan pengembangannya serta memperhatikan kemungkinan pertumbuhannya diantara industri menengah dan besar, maka industri kecil dibagi dalam 2 (dua) cara yaitu pembagian dalam katagori dan pembagian ke dalam kelompok yang dihimpun dalam sentra-sentra.

Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kedua pembagian tersebut.

Katagori Industri Kecil.

Pengkatagorian Industri Kecil didasarkan atas kemungkinan pertumbuhan dan keterkaitannya dengan industri menengah dan besar dimana yang mempunyai kemungkinan besar dikategorikan sebagai industri kecil moderen dan yang lainnya sebagai industri kecil tradisional.

Dalam menentukan katagori tersebut telah dibuat kriteria yang didasarkan pada ciri-ciri dari industri kecil itu sendiri yaitu:

a. Ciri Industri Kecil Modern.

- Menerapkan teknologi madya dengan skala produksi terbatas
- Berdasarkan dukungan R & D dan Enjiniring
- Terkait dalam sistem produksi industri besar/średang dan sistem pemasaran nasional maupun ekspor.
- Menggunakan peralatan/mesin produksi khusus
- Penanganan kegiatan usahanya bersifat lintas bidang/sekter dan lintas batasan pembinaan administratif pemerintahan.

b. Ciri Industri Kecil Tradisional

- Menerapkan teknologi sederhana
- Berlandaskan dukungan unit pelayanan teknis
- Terkait dengan sekter ekonomi lain secara regional
- Menggunakan peralatan/mesin produksi konvensional
- Penanganan kegiatan usahanya bersifat sektoral dan dalam batas pembina-

an administratif pemerintahan

Kelompok dan Sentra Industri Kecil.

Dalam usahanya untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil, Departemen Perindustrian telah mengelompokkan semua jenis Industri Kecil dalam (5 (lima) kelompok dan membentuk sentra-sentra di seluruh wilayah Indonesia, yang didukung dengan Unit Pelayanan Industri (UPI— dan Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Pengelompokan Industri Kecil.

Cara mengelompokkan Industri Kecil didasarkan pada proses industri yang hampir sama, yang kemudian terbentuklah kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Industri Pangan
2. Kelompok Industri Sandang & Kulit
3. Kelompok Industri Kimia & Bahan Bangunan
4. Kelompok Industri Kerajinan & Umum
5. Kelompok Industri Logam

Jenis-jenis industri yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Industri Pangan, antara lain adalah:

Kerupuk, tepung tapioka, terasi, tahu-tempe, gula merah, garam rakyat, dodol, emping. ikan asin manisan buah oncom, roti, jamur, minyak kelapa, madu, tepung sagu dan lain sebagainya.

Kelompok Industri Sandang & Kulit, antara lain adalah:

Sulaman, bordir, tenun, konveksi, sepatu, baik klompen, penyamakan kulit, peci, barang kulit dan lain sebagainya.

Kelompok Industri Kimia & Bahan Bangunan, antara lain adalah:

Bata, kapur, arang kayu, gambir, minyak nilam, genteng, tegel, batako, meubel kayu dan lain sebagainya.

Kelompok Industri Kerajinan & Umum, antara lain adalah:

Anyaman, keramik/geratah, batu ukir, ukiran kayu, sapu, payung, kerajinan perak dan lain sebagainya.

Kelompok Industri Logam, antara lain adalah:

Pande besi, kaleng, cor logam, galangan kapal, bengkel las, suku cadang, komponen elektronik dan lain sebagainya.

Sentra Industri Kecil

Dalam usaha membina Industri Kecil oleh Departemen Perindustrian telah dibentuk sentra-sentra Industri Kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh unit pelayanan industri/unit pelayanan teknis. Jumlah sentra di seluruh Indonesia sampai dengan April 1984 adalah 1180 dan dalam Repelita IV direncanakan akan dibangun 6000 sentra.c Penyebaran dari sentra-sentra tersebut serta jumlah UPT-nya dapat dilihat dalam tabel 2. Penyebaran yang lebih mendetail serta letak geografiknya dapat dilihat dalam gambar 1.

Kebijaksanaan Pembinaan Industri Kecil.

Kebijaksanaan Pembinaan Industri Kecil telah dituangkan dalam "Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Sentra", dimana bagian yang erat hubungannya dengan makalah ini adalah:

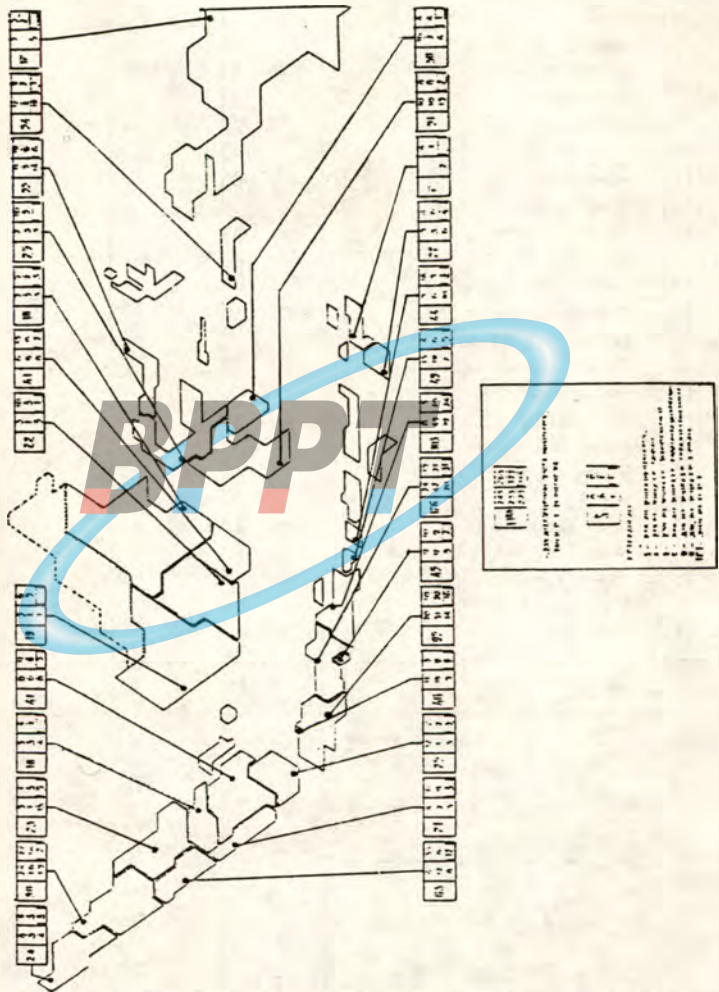
1. Pembinaan Industri Kecil dibagi dalam dua katagori:
 - a. Industri Kecil/Kerajinan Modern yang menerapkan teknologi madya.
 - b. Industri Kecil/Kerajinan Tradisional yang menerapkan teknologi sederhana.

Pembagian tersebut dilakukan mengingat peluang pengembangan industri kecil/kerajinan modern untuk dikaitkan antar industri dan dengan sektor ekonomi lain adalah sangat besar, termasuk industri mesin dan logam. Sedangkan industri kecil/kerajinan tradisional tetap dipertahankan sebagai peluang kesempatan usaha dan kesempatan kerja.

Tabel 2 : Sentra-sentra Industri Kecil

No.	Propinsi	Jumlah sentra	Jumlah UPI/UPT
1.	Aceh	24	3
2.	Sumatera Utara	96	7
3.	Sumatera Barat	63	12
4.	Riau	23	5
5.	Jambi	18	—
6.	Sumatera Selatan	41	5
7.	Bengkulu	21	3
8.	Lampung	25	2
9.	DKI Jakarta	46	9
10.	Jawa Barat	95	16
11.	Jawa Tengah	126	21
12.	DI Yogyakarta	45	7
13.	Jawa Timur	103	24
14.	Kalimantan Selatan	41	2
15.	Kalimantan Barat	19	—
16.	Kalimantan Tengah	22	1
17.	Kalimantan Timur	18	3
18.	Sulawesi Selatan	51	7
19.	Sulawesi Tenggara	30	1
20.	Sulawesi Tengah	25	—
21.	Sulawesi Utara	55	6
22.	B a l i	49	5
23.	Nusa Tenggara Barat	44	2
24.	Nusa Tenggara Timur	22	4
25.	Timor Timur	7	—
26.	Maluku	54	1
27.	Irian Jaya	17	—
Jumlah		1.180	146

PETA SENTRA INDUSTRI KECIL PADA MASING - MASING PROPINSI



Gambar 1 : Peta Lokasi Sentra

2. Penentuan program pembinaan dan pengembangan industri kecil/kerajinan moderen ditetapkan dan dikendalikan pelaksanaannya oleh Pusat. Sedangkan pembinaan dan pengembangan industri kecil/kerajinan tradisional ditetapkan dan dikendalikan oleh Pusat bersama Kanwil. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kanwil/Kandep Perindustrian. Kerjasama di daerah dengan organisasi/instansi lain sebagai kekuatan dinamis dalam melaksanakan program kegiatan secara operasional.
3. Penentuan sentra-sentra yang akan dibina dan program kegiatannya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil atas usul masing-masing Direktorat Cabang Industri dan Kanwil Departemen Perindustrian.
4. Berdasarkan ciri-ciri industri kecil/kerajinan modern dan industri kecil/kerajinan tradisional, maka pembinaan masing-masing katagori akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang berbeda:
 - a. Pada dasarnya pembinaan industri kecil/kerajinan moderen dikembangkan melalui program keterkaitan antar industri dan dengan sektor ekonomi lain berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang didukung oleh skema kredit (Bank).
 - b. Sedangkan industri kecil/kerajinan tradisional dikembangkan melalui program keterkaitan dengan sektor ekonomi lain berlandaskan prinsip-prinsip Bapak Angkat yang didukung oleh APBN.
5. Sebagai pedoman arah pembinaan dan pengembangan teknologi yang dikuasai oleh industri kecil/kerajinan modern dan tradisional digunakan klasifikasi tingkat teknologi yang sudah dibakukan. Dengan demikian sistem monitoring kemampuan penguasaan teknologi bagi industri kecil/kerajinan harus diukur dengan tolok ukur tersebut.
6. Dalam pembinaan industri/kerajinan diklasifikasikan dalam bidang usaha. Sesuai kebutuhan pembinaan dan pengembangan yang secara optimal dinilai efektif. Secara administratif maupun sistem pembinaan dan pengembangannya. Tujuan dari pada pembedangan usaha tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan spesialisasi sentra-sentra industri kecil/kerajinan agar memudahkan dalam pembinaannya sesuai jenis kegiatan usaha dan dukungan disiplin teknologinya.
7. Bagi sentra-sentra yang telah jalan kaitan pemasaran hasil produksinya dan sudah jelas produk yang akan dibuat/dikembangkan di dalam sentra tersebut dapat didukung oleh UPT yang anggarannya berasal dari Pemerintah.

ANALISA PRIORITAS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL.

Dari beberapa kebijaksanaan yang dituliskan dalam bab 2, dapat dirumuskan 5 (lima) kalimat kunci yang akan digunakan dalam pembahasan prioritas pembinaan dan pengembangan. Kalimat kunci tersebut adalah:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
2. Pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan) yang tinggi
3. Pemantapan struktur industri.
4. Penciptaan stabilitas nasional (pertahanan).
5. Persiapan tinggal landas.

Dari kalimat kunci di atas dapat diturunkan sasaran-sasaran ekonomi/ industri/usaha yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembinaan dan pengembangan. Dalam hal ini prioritas tinggi diberikan kepada kelompok industri kecil yang:

1. Mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi.
2. Memberikan nilai tambah yang tinggi.
3. Mempunyai keterkaitan dengan sektor industri/ekonomi lain yang kuat.
4. Merupakan industri kecil yang tangguh.
5. Memungkinkan produktivitas tenaga kerja yang tinggi.

Dalam pelita I dan II terutama pelita III pembinaan industri kecil telah dilakukan dengan gigih. Oleh karena hal tersebut, maka untuk pemantapan pembinaan selanjutnya perlu ditentukan *prioritas pembinaannya*.

Pola berpikir dari penulis dalam penentuan prioritas adalah sebagai berikut:

Prioritas ditentukan dengan mempelajari korelasi antara sasaran/missi yang telah digariskan dengan pertumbuhannya yang telah dicapai selama ini. Berdasarkan pola berpikir di atas, maka perlu ada pengkajian terhadap keadaan pertumbuhan industri kecil selama pelita III.

disamping analisa di atas, penentuan prioritas pembinaan masih juga di-analisa terhadap potensi pasar.

Analisa Berdasarkan Data, dan Informasi Industri Kecil.

Direktorat Jenderal Industri Kecil telah menghimpun data dan informasi industri kecil sejak tahun 1980. Dalam himpunan data dan informasi tersebut hal-hal yang diungkapkan adalah: jumlah unit usaha, jenis unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi, nilai bahan baku dan nilai investasi. Hasil penjumlahan untuk setiap kelompok industri dari semua propinsi di seluruh Indonesia yang diolah dari data dan informasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Industri Ke-

cil ditabelkan dalam lampiran I, II, III, IV dan V. Sedangkan penjumlahan lebih lanjut dalam kelompok-kelompok industri dapat dilihat dalam tabel 3

Untuk keperluan penganalisaan lebih lanjut dicari nilai-nilai spesifik yang diolah dari tabel 3 tersebut. Dari pengolahan ini didapat nilai spesifik per unit usaha mengenai jumlah tenaga kerja, nilai produksi, bahan baku dan investasi seperti yang ditulis dalam tabel 4.

Nilai spesifik yang sejenis tetapi terhadap tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel 5.

Dari tabel 4 dan 5 tersebut dapat dicari korelasinya antara pertumbuhan dan misi/sasaran yang dinyatakan dalam urutan prioritas pembinaan dari pengembangan berdasarkan daya serap tenaga kerja, nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja seperti terlihat dalam matrik pada gambar 2.

Kelompok industri / Kriteria	Pangan	Sandang & Kulit	Kimia & Bahan Bangunan	Kerajinan Umum	Logam
Daya serap tenaga kerja	4	3	1	5	2
Nilai tambah	4	3	1	5	2
Produktivitas tenaga kerja	4	2	1	5	3

Gambar 2 : Matrik Prioritas

Dari matrik di atas, korelasi antara misi/sasaran dengan pertumbuhan telah menunjukkan adanya prioritas sebagai berikut:

1. Kelompok Industri Kimia & Bahan Bangunan
2. Kelompok Industri Logam
3. Kelompok Industri Sandang dan Kulit
4. Kelompok Industri Pangan
5. Kelompok Industri Kerajinan dan Umum

Tabel 3 : Jumlah Unit Usaha & Tenaga Kerja dan Nilai Produksi, Bahan Baku & Investasi

No.	Jenis Industri	Jumlah		Nilai (x Rp. 1000,-)			
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Bahan Baku	Investasi	
1.	Pangan	19.265	49.380	49.965.985	26.549.647	10.528.899	
2.	Sandang & Kulit	23.265	78.340	187.665.243	144.162.509	19.860.525	
3.	Kimia & Bahan Bangunan	13.352	63.923	285.727.484	129.212.073	25.649.783	
4.	Kerajinan & Umum	31.613	65.873	41.402.412	11.236.195	5.735.728	
5.	Logam	6.311	23.314	28.358.131	11.366.409	5.166.388	
	Jumlah	93.806	280.830	593.119.255	122.526.833	66.941.323	

Tabel 4. Nilai Spesifik Per Unit Usaha (UU)

No.	Jenis Industri	Tenaga Kerja (T.K/U.U)	Nilai Spesifik (x Rp. 1.000/UU)		
			Produksi	Bahan Baku	Investasi
1.	Pangan	2,56	2.594	1.378	546
2.	Sandang & Kulit	3,37	8.066	6.196	854
3.	Kimia & Bahan Bangunan	4,79	21.400	9.677	1.921
4.	Kerajinan & Umum	2,08	1.310	355	181
5.	Logam	3,69	4.493	1.801	819

Tabel 5. Nilai Spesifik Per Tenaga Kerja (TK)

No.	Jenis Industri	Nilai Spesifik (x Rp. 1.000/TK)			
		Produksi	Bahan Baku	Investasi	Nilai Tambah
1.	Pangan	1.012	538	213	474
2.	Sandang & Kulit	2.395	1.840	256	555
3.	Kimia & Bahan Bangunan	4.470	2.021	401	2.449
4.	Kerajinan & Umum	629	170	87	459
5.	Logam	1.216	488	222	728

Analisa Berdasarkan Potensi Pasar.

a. Potensi Pasar Industri Kecil.

Didalam buku "Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil", yang disusun oleh Departemen Perindustrian (April 1985) telah ditunjukkan potensi pasar bagi Industri Kecil, yang sekaligus menggambarkan keterkaitan antara Industri Kecil dengan sektor industri yang lain dan keterkaitannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Potensi pasar yang ditunjukkan dapat dilihat dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6 : Potensi Pasar Bagi Industri Kecil

No.	Sektor Industri/ Ekonomi lain	Produk/Jasa darin Industri Kecil
1.	2	3
1.	Industri Dasar	a). Cor logam, tempat, permesinan, penyambungan, pembentukan, perlakuan logam, pelapisan. b). Peralatan elektronika, telekomunikasi, alat/mesin pertanian, kapal nelayan, jasa keteknikan (enjiniring). c). Kapur, pasir kwarsa, batuan fosfat, bahan kimia, dsb.
2.	Industri Aneka	a). Cor logam, tempat, permesinan, penyambungan, pembentukan, perlakuan logam, pelapisan. b). Peralatan elektronika, radio, mesin/alat pertanian. c). Bahan/barang tekstil, garment, barang/bahan kulit, pangan, bahan kimia, bahan bangunan.
3.	Pertanian/Transmigrasi	a). Cangkul, parang dan sejenisnya. b). Alat/mesin pengolah hasil pertanian dengan teknologi sederhana/madya, perabot pokok rumah tangga transmigran.
4.	Pekerjaan Umum/Perumahan	a). Peralatan pengatur irigasi. b). Bahan bangunan.
5.	Pariwisata	a). Hasil kerajinan, patung, anyaman, ornamen barang dekoratif. b). Hasil ketrampilan tradisional, makanan, barang logam-kayu-bambu-kaian plastik-mainan anak dan sebagainya.
6.	Pendidikan/Kebudayaan	a). Peralatan pengajar, peragaan pendidikan, peralatan demonstrasi/laboratoria. b).. Pakaian sekolah, peralatan sekolah, sepatu sekolah. c). Pelestarian seni tradisional, budaya bangsa. d). Peralatan seni budaya, souvenir, dekoratif.
7.	Perdagangan/Koperasi.	a). Produk hasil kerajinan, makanan, garment, barang kulit, ornamen, hasil olahan industri kecil.

Tabel 6 : Potensi Pasar Bagi Industri Kecil

1	2	3
8.	Pembangunan wilayah	a). Masukan teknologi manufaktur, proses pengolahan, energi, ketrampilan. b). Penciptaan iklim usaha dan kesempatan kerja. c). Pengamanan produksi melalui pencadangan kegiatan usaha. d). Pengaturan tata niaga. e). Jaminan usaha/kredit.

Dari tabel diatas dapat dipastikan bahwa potensi pasar bagi Industri Kecil sangat besar. Bila hal ini digali lebih mendetail dan didaya gunakan, maka pasar tersebut dapat menjadi *Wahana bagi pembinaan dan pengembangan Industri Kecil* yang sekaligus dapat *menunjang "deletion program"*, yang diprogramkan oleh Pemerintah.

Keterkaitan dengan sektor industri/ekonomi lainnya.

Dari tabel potensi pasar diatas, bila dikaji lebih lanjut terhadap produk dan jasa yang dapat dihasilkan/dilayani oleh Industri Kecil, maka terjadi gambaran keterkaitan antara kelompok-kelompok Industri Kecil dengan sektor Industri /ekonomi lainnya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada matriks dalam gambar 3.

Berdasarkan matrik keterkaitan diatas, dan dugaan tentang besarnya volume pasar pada sektor Industri/ekonomi yang lain, maka dapat diperkirakan urutan peluang kelompok Industri Kecil dalam mendapatkan pasarnya. Urutan tersebut kurang lebih sebagai berikut:

1. Kelompok Industri Logam.
2. Kelompok Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
3. Kelompok Industri Sandang dan Kulit.
4. Kelompok Industri Kerajinan dan Umum.
5. Kelompok Industri Pangan.

Perkiraan urutan diatas dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembinaan dan pengembangan.

Kesimpulan Prioritas.

Dari kedua analisa di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa urutan prioritas pembinaan dan pengembangan industri kecil yang diperkirakan dapat memenuhi misi/sasaran dan dapat tumbuh dengan wajar adalah:

1. Prioritas pertama:
 1. Kelompok Industri Kimia & Bahan Bangunan dan
 2. Kelompok Industri Logam.
2. Prioritas Kedua:
 1. Kelompok Industri Sandang dan Kulit.
3. Prioritas Ketiga:
 1. Kelompok Industri Pangan
 2. Kelompok Industri Kerajinan dan Umum.



Kelompok Industri Kecil Sektor Industri/Ekonomi lain	Pangan	Sandang & Kulit	Kimia & Bahan Bangunan	Kerajinan & Umum	Logam
Industri Dasar	○	○	◐	○	●
Industri Aneka	◐	◐	◐	◐	●
Pertanian/Transmigrasi	○	○	◐	○	●
Pekerjaan Umum/Perumahan	○	◐	●	○	◐
Pariwisata	◐	●	○	●	○
Pendidikan/Kebudayaan	○	◐	○	◐	◐
Perdagangan/Koperasi	◐	●	●	●	○

Keterangan : ● = Besar ◐ = Sedang ○ = Kecil

Gambar 3. Matriks keterkaitan antara Kelompok Industri Kecil dengan Sektor Industri/ Ekonomi lain.

ANALISA ARAH PEMBINAAN

Di dalam usaha pembinaan Industri Kecil, telah ditentukan adanya dua katagori industri kecil yaitu: Industri Kecil *Moderen* dan Industri Kecil *Tradisional*. Dalam hal ini akan timbul pertanyaan kemana arahnya: Industri Kecil *Modern* atau Industri Kecil *Tradisional*, atau: Industri Kecil yang mana yang akan diarahkan menjadi industri modern dan yang mana yang akan diarahkan menjadi industri tradisional.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis mencoba mencari arah pembinaan dengan mengkorelasikan terhadap beberapa misi yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan anggapan bahwa:

Industri moderen adalah industri yang menerapkan teknologi yang lebih canggih.

Arah Pembinaan dengan kaitannya dengan Katagori Industri

a. Pembahasan terhadap misi

1. Arah Pembinaan berdasarkan Daya Serap Tenaga Kerja

Dari tabel 4 dan 5 dapat dibuat korelasi antara daya serap tenaga kerja per unit usaha dengan besarnya investasi per tenaga kerja, seperti terlihat pada gambar 4. Dengan anggapan bahwa investasi per tenaga kerja identik dengan teknologi yang diterapkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: *Penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dapat dicapai dengan penerapan teknologi yang lebih maju.*

2. Arah Pembinaan berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

Sumbangan industri kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dicerminkan dalam besarnya *nilai tambah* yang dihasilkan per tenaga kerja. Dari tabel 4 dan 5 dapat diturunkan korelasi antara nilai tambah dan industri per tenaga kerja, yang dapat dilihat dalam gambar 5.

Dari korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa: *Peningkatan nilai tambah dapat dicari dengan penerapan teknologi yang lebih maju.*

3. Arah Pembinaan berdasarkan Struktur Industri.

Struktur Industri sangat tergantung dari keterkaitan antar industri/ sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan keterkaitan industri kecil dengan sektor industri/ekonomi lainnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3 yang disusun dengan memperhatikan volume pasar, dapat disimpulkan bahwa: *Industri kecil akan menjadi bagian dari struktur industri dengan lebih mantap apabila menerapkan teknologi yang lebih maju.*

4. Arah Pembinaan berdasarkan Stabilitas Nasional.

Dari peta penyebaran industri kecil dan sentra-sentranya seperti ter-

lihat pada gambar 1, jelaslah bahwa dalam keadaan darurat militer, diharapkan agar sebagian dari industri kecil tersebut dapat merubah/diubah menjadi rangkaian industri strategi pertahanan. Untuk hal ini jelaslah bahwa: *Untuk keperluan strategi pertahanan diperlukan adanya industri kecil yang menerapkan teknologi maju.*

5. Arah Pembinaan sebagai persiapan tinggal landas.

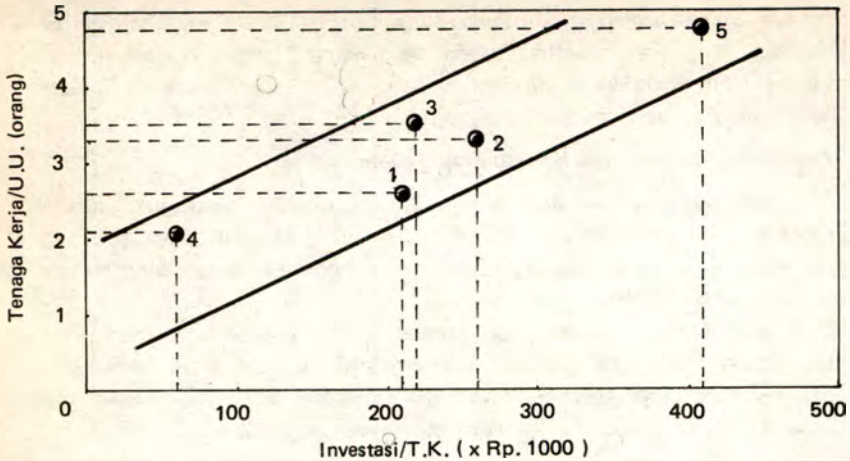
Pada waktu tinggal landas diharapkan bahwa industri yang diprioritaskan sudah merupakan industri-industri yang tangguh. Salah satu syarat industri tangguh adalah industri yang memiliki *tenaga kerja dengan produktivitas tinggi.*

Dari tabel 4 dan 5 dapat dicari korelasi antara produktivitas dan investasi seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6. Dari korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa: *Penerapan teknologi yang lebih maju merupakan salah satu kondisi untuk mempercepat tinggal landas.*

b. Kesimpulan

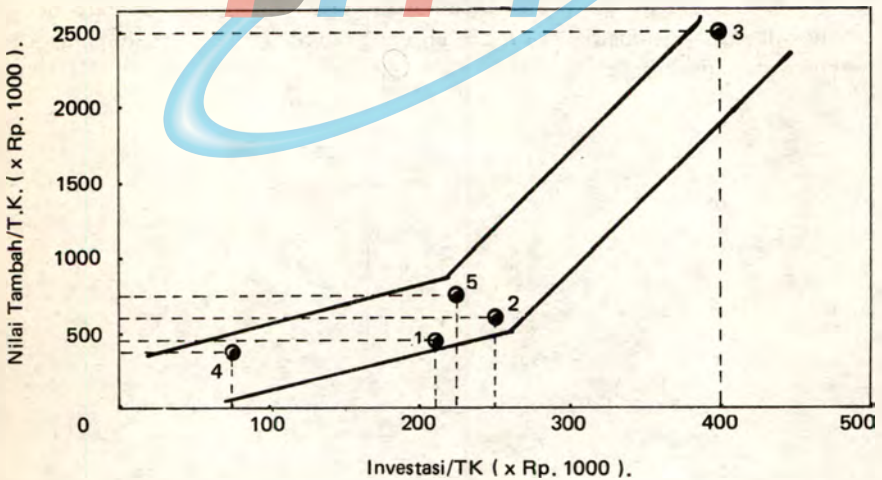
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang pencapaian misi industri dalam pembangunan, jenis industri tertentu (pilihan) perlu dibina untuk *menjadi industri kecil modern yang menerapkan teknologi maju.*

Disamping itu perlu juga diperhatikan agar pembinaan tersebut memungkinkan bagi industri kecil moderen yang dibina untuk tumbuh menjadi industri menengah/besar.



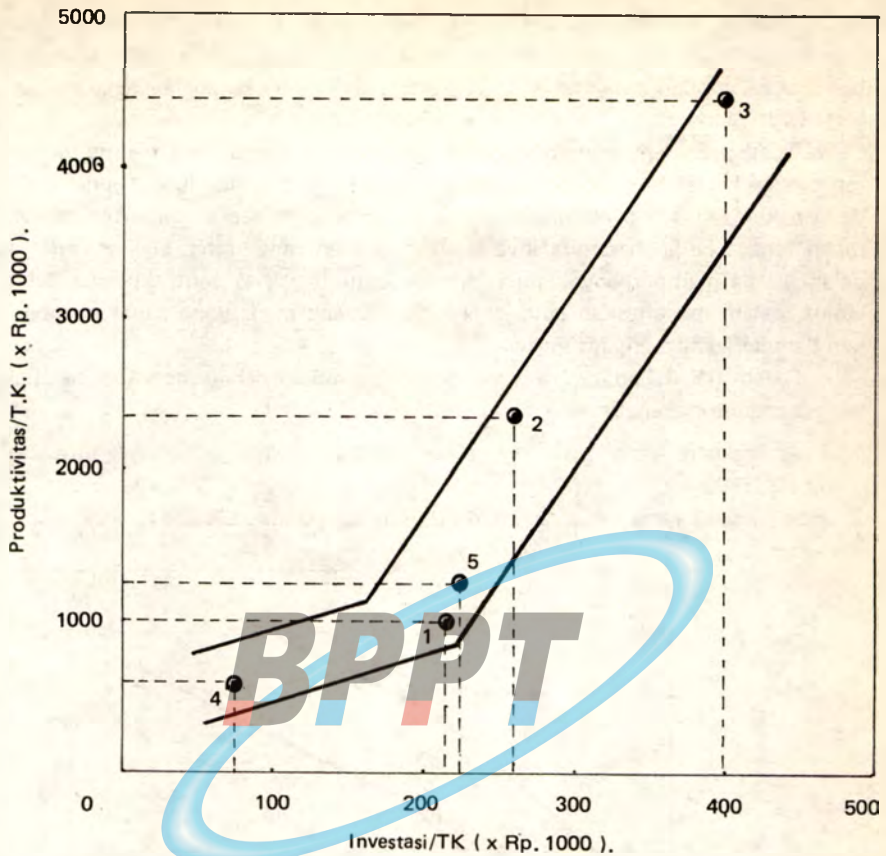
Gambar 4 : Hubungan antara Penyerapan Tenaga Kerja dengan Investasi per Tenaga Kerja.

- Keterangan :
1. Industri Pangan
 2. Industri Sandang & Kulit.
 3. Industri Kimia & Bahan Bangunan.
 4. Industri Kerajinan & Umum.
 5. Industri Logam.



Gambar 5 : Hubungan antara investasi per tenaga kerja dengan nilai tambah per tenaga kerja.

- Keterangan :
1. Industri Pangan.
 2. Industri Sandang & Kulit.
 3. Industri Kimia & Bahan Bangunan.
 4. Industri Kerajinan & Umum.
 5. Industri Logam.



Gambar 6 : Hubungan antara investasi per tenaga kerja dengan produktivitas per tenaga kerja.

Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Industri pangan. | 4. Industri kerajinan & umum. |
| 2. Industri sandang & kulit. | 5. Industri logam. |
| 3. Industri kimia & bahan bangunan. | |

Penambahan Industri Baru.

Sudah jelas bahwa penambahan jumlah industri baru akan mempercepat tercapainya misi industri dalam pembangunan, dibawah ini dicoba menganalisa penambahan jumlah industri didasarkan pada kemampuan penyerapan tenaga kerja dan besarnya industri.

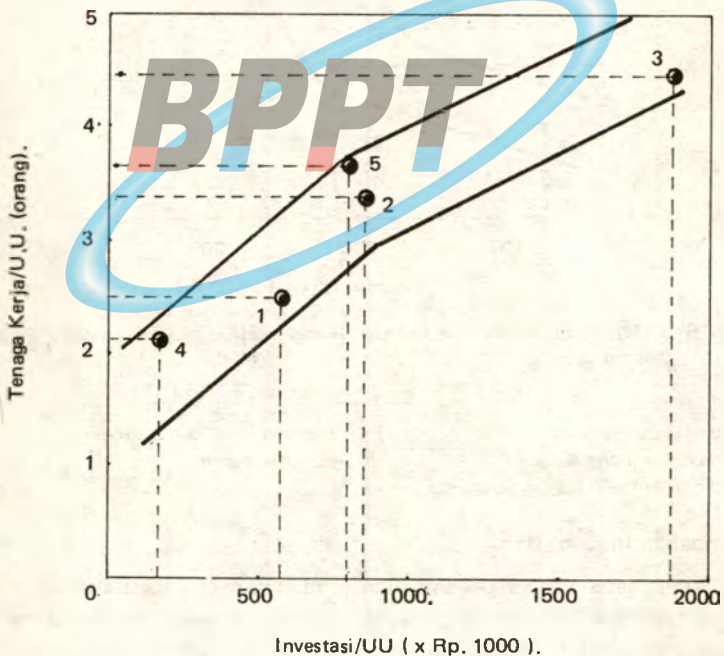
Dari tabel 4 dan 5 dapat ditemukan hubungan antara penyerapan tenaga kerja dan besarnya investasi per unit usaha (gambar 7), dan hubungan antara jumlah unit usaha dan investasi per tenaga kerja (gambar 8).

Gambar 7 menunjukkan bahwa makin besar investasi/u.u. makin besar juga kemampuan penyerapan tenaga kerja. Tetapi juga terlihat bahwa pertambahan kemampuan penyerapan tenaga kerja makin berkurang dengan bertambah besarnya investasi.

Gambar 8 memperlihatkan bahwa jumlah unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, jumlahnya lebih kecil daripada jumlah unit usaha dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang bertentangan antara penyerapan tenaga kerja, besarnya investasi dan jumlah unit usaha. Oleh karena itu dalam usaha memperbanyak jumlah industri (unit usaha) perlu dipelajari lebih lanjut, dalam menentukan jenis-jenis industri yang mana yang dapat memberikan dampak yang menguntungkan.

Dalam hal ini ada 2 hal yang perlu ditentukan dalam mencapai dampak yang menguntungkan, yaitu:

1. Jenis industri yang mana yang perlu diperbanyak, jumlahnya (investasi dibatasi).
2. Jenis industri yang mana yang perlu diperbesar (jumlah dibatasi).



Gambar 7 : Hubungan antara investasi per unit usaha dan penyerapan tenaga kerja.

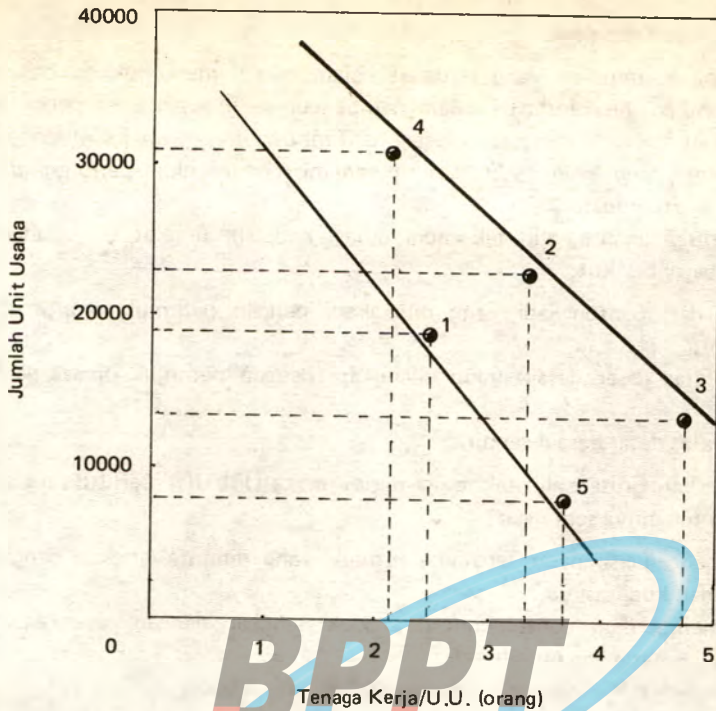
Keterangan : 1. Industri Pangan.

2. Industri Sandang & Kulit.

3. Industri Kimia & Bahan Bangunan.

4. Industri Kerajinan & Umum.

5. Industri Logam.



Gambar 8 : Hubungan antara jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja.

- Keterangan :
1. Industri Pangan.
 2. Industri Sandang & Kulit.
 3. Industri Kimia & Bahan Bangunan.
 4. Industri Kerajinan & Umum.
 5. Industri Logam.

PENINGKATAN SARANA PEMBINAAN.

Usaha pembinaan industri kecil dilakukan oleh Departemen Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kecil melalui pengkategorian industri, pengelompokan industri, pembentukan sentra-sentra serta pendirian UPI dan UPT, seperti yang dikemukakan dalam bab 3. Jaringan pembinaan tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa usaha jaringan pembinaan yang diterapkan sudah cukup memadai. Persoalan yang dihadapi tentunya adalah peningkatan kemampuan unit-unit pembinaan yang dalam hal ini adalah *kemampuan daripada UPT/UIPI*.

Kemampuan Alih Teknologi.

Beberapa kesimpulan yang terdapat dalam bab 5 menunjukkan bahwa untuk mengemban misi industri dalam pembangunan industri kecil perlu dibina agar dapat tumbuh menjadi *industri kecil moderen yang mampu menggunakan teknologi yang lebih maju*. Kesimpulan ini menunjukkan perlunya *alih teknologi* kedalam industri kecil.

Untuk keperluan analisa, alih teknologi dibagi kedalam tingkat kemudahan/kesukaran sebagai berikut:

1. Membuat dari contoh jadi yang dilengkapi dengan petunjuk cara/proses pembuatan.
2. Membuat atas dasar desain yang dilengkapi dengan petunjuk proses pembuatan.
3. Membuat atas dasar desain sendiri.

Berdasarkan urutan alih teknologi diatas, maka UPI/UPT perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga:

1. Mampu menganalisa pasar terutama produk yang diminta lengkap dengan kuantitas dan kualitasnya.
2. Mampu memberikan contoh-contoh produk lengkap dengan perencanaan proses pembuatan yang diperlukan.
3. Mampu membuat/menyediakan desain produk yang lengkap.
4. Mampu membimbing pembuatan desain.

Dalam kaitan dengan pematapan struktur industri, dimana keterkaitan merupakan dasar utama, maka perlu diperhatikan bahwa *keterkaitan industri juga direfleksikan dalam keterkaitan produk*.

Untuk keperluan ini maka industri (kecil) harus mengenal dan menghayati tentang makna *standar dan normalisasi produk*. Oleh karena itu disamping ke-4 hal diatas, UPI/UPT juga harus mempunyai kemampuan:

5. Memperkenalkan dan mempunyai informasi tentang standar dan normalisasi produk yang diperlukan
6. Mempunyai kemampuan atau menyediakan sarana uji coba yang diperlukan untuk menilai kualitas.

Kemampuan dalam memberikan latihan.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, stratifikasi kualitas tenaga kerja dalam Industri Kecil adalah sebagai berikut:

- a. 80% terdiri dari tenaga kerja yang tidak tamat SLTP dan yang lebih rendah pendidikannya.
- b. 15% tamat SLTP tetapi tidak tamat SLTA.
- c. 5% lain-lain.

Sehubungan dengan kondisi tenaga kerja seperti diatas, maka jelas bahwa UPI/UPT harus mempunyai kemampuan:

1. Membuat program latihan yang tepat dan mengkoordinasikan pelaksanaan latihan.
2. Menyediakan/mengusahakan tempat dan sarana untuk latihan.

Usaha Peningkatan Lainnya.

Dalam uraian diatas jelaslah bahwa dalam keadaan yang ideal UPI/UPT perlu mempunyai kemampuan yang luar biasa banyaknya, dimana untuk sebagian besar UPI/UPT hal tersebut tidak mungkin diadakan. oleh karena hal diatas, maka disamping usaha meningkatkan kemampuannya. UPI/UPT perlu bekerja sama yang lebih erat dengan kelompok pengusaha, unit-unit latihan kerja, unit-unit penelitian dan perguruan tinggi setempat.

KESIMPULAN

1. Untuk mencapai misi dengan mempertimbangkan pertumbuhan industri yang ada, analisa yang dilandasi dengan penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, produktivitas, struktur industri dan strategi pertahanan, diusulkan agar: Industri Kecil tertentu yang sudah siap, dibina dan dikembangkan untuk menjadi industri kecil moderen yang menerapkan teknologi maju dan dapat tumbuh menjadi industri menengah/besar.
2. Berdasarkan sifat keterkaitannya dengan industri lain. perkiraan potensi pasar dan pertumbuhannya, diusulkan agar pembinaan menjadi industri kecil moderen diprioritaskan kepada kelompok:
 - Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
 - Industri Logam.Sedangkan tiga kelompok industri lainnya pembinaannya diarahkan untuk pemenuhan keperluan konsumen pengguna langsung dengan meningkatkan mutu yang (bila mungkin) didasarkan pada standar produk.
3. Dalam penganalisaan untuk meningkatkan kesempatan kerja karena adanya korelasi yang berlawanan antara, penyerapan tenaga kerja, besarnya investasi dan jumlah unit usaha, maka perlu adanya pengkajian yang teliti sebelum menentukan pilihan apakah sesuatu jenis industri diperbesar atau diperbanyak.
4. Sejalan dengan tugasnya dalam membina kearah industri kecil moderen maka UPI/UPT diharapkan menguasai prinsip-prinsip alih teknologi, manajemen dan perbankan.
5. Untuk menunjang meningkatkan kemampuannya UPI/UPT perlu bekerja sama dengan kelompok pengusaha termasuk kelompok perbankan, unit-unit peneliti, unit-unit latihan kerja dan perguruan tinggi setempat.

No.	Propinsi	Jumlah		Nilai (x Rp. 1000,-)		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Bahan Baku	Investasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	948	3.549	1.637.837	854.360	246.073
2.	Sumatera Utara	1.034	3.355	2.407.325	1.306.310	366.454
3.	Sumatera Barat	333	1.513	1.173.072	472.338	108.304
4.	Riau	176	464	564.583	294.327	76.547
5.	Jambi	253	648	743.520	496.593	42.508
6.	Sumatera Selatan	248	853	461.446	264.442	114.771
7.	Bengkulu	117	244	111.000	63.950	11.160
8.	Lampung	1.158	2.943	3.373.191	1.778.067	900.518
9.	DKI Jakarta	2.233	4.458	3.657.893	1.778.036	556.210
10.	Jawa Barat	1.830	4.996	15.633.612	7.634.147	3.284.955
11.	Jawa Tengah	4.442	9.280	2.465.094	1.322.388	431.427
12.	Di. Yogyakarta	497	2.212	1.970.286	988.048	367.658
13.	Jawa Timur	770	1.929	4.971.775	3.228.460	1.038.861
14.	Kalimantan Selatan	318	720	563.483	374.804	153.443
15.	Kalimantan Barat	265	610	399.600	239.760	75.230
16.	Kalimantan Tengah	100	279	151.125	89.250	44.725
17.	Kalimantan Timur	87	611	55.704	26.981	89.644
18.	Sulawesi Selatan	855	1.638	343.815	133.242	306.258
19.	Sulawesi Tenggara	724	2.619	4.293.500	2.518.694	922.050
20.	Sulawesi Tengah	158	481	590.870	259.435	66.706
21.	Sulawesi Utara	468	1.070	1.045.906	631.720	776.385
22.	B a l i	1.387	2.135	584.184	378.204	167.826
23.	Nusa Tenggara Barat	464	1.332	1.368.820	671.913	76.678
24.	Nusa Tenggara Timur	77	146	64.800	43.110	18.456
25.	Timor Timur	—	—	—	—	—
26.	Maluku	266	1.112	704.817	382.552	204.032
27.	Irian Jaya	57	183	628.727	318.616	82.020
	J u m l a h	19.265	49.380	49.969.985	20.549.647	10.528.899

No.	Propinsi	Jumlah		Nilai (x Rp. 1000,-)		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Bahan Baku	Investasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	231	610	1,625,154	1,300,255	22,891
2.	Sumatera Utara	2,039	5,905	7,168,686	5,024,624	616,338
3.	Sumatera Barat	1,317	3,662	5,587,946	4,242,422	268,679
4.	Riau	60	60	67,500	54,000	1,800
5.	Jambi	117	190	82,283	38,567	23,050
6.	Sumatera Selatan	871	1,253	175,700	140,560	41,250
7.	Bengkulu	25	50	10,290	8,232	7,000
8.	Lampung	20	36	31,080	24,864	1,500
9.	DKI Jakarta	812	3,729	4,958,458	2,372,712	5,860,214
10.	Jawa Barat	3,514	23,960	41,658,083	32,701,428	1,090,858
11.	Jawa Tengah	4,042	14,422	10,904,394	8,060,906	7,560,395
12.	DI. Yogyakarta	620	3,839	4,875,396	2,832,411	2,502,848
13.	Jawa Timur	2,615	6,662	103,546,110	82,235,353	276,414
14.	Kalimantan Selatan	1,555	2,115	1,387,289	913,833	102,688
15.	Kalimantan Barat	112	212	112,000	75,000	23,050
16.	Kalimantan Tengah	19	138	1,024,620	796,217	13,030
17.	Kalimantan Timur	56	398	290,504	204,241	82,750
18.	Sulawesi Selatan	617	1,456	391,009	289,196	1,096,878
19.	Sulawesi Tenggara	82	595	104,295	78,220	38,705
20.	Sulawesi Tengah	80	150	31,704	20,252	4,173
21.	Sulawesi Utara	427	1,704	360,861	218,168	11,025
22.	B a l i	2,989	5,530	1,214,296	887,859	120,044
23.	Nusa Tenggara Barat	952	1,439	2,032,823	1,626,258	83,445
24.	Nusa Tenggara Timur	65	150	12,950	10,360	5,500
25.	Timor Timur	—	—	—	—	—
26.	Maluku	20	75	11,812	6,670	6,000
27.	Irian Jaya	—	—	—	—	—
	J u m l a h	23.265	78.340	187.665.243	144.162.509	19.860.525

Lampiran III. KELOMPOK INDUSTRI KIMIA & BAHAN BANGUNAN

No.	Propinsi	Jumlah		Nilai (x Rp. 1000,--)		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Bahan Baku	Investasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	202	1.193	889.102	618.057	1.366.278
2.	Sumatera Utara	1.153	5.609	3.338.856	1.130.052	1.475.964
3.	Sumatera Barat	172	796	289.644	278.290	77.990
4.	Riau	575	2.664	3.794.521	2.987.678	3.713.002
5.	Jambi	144	932	656.050	213.391	63.225
6.	Sumatera Selatan	471	2.960	834.410	246.800	288.720
7.	Bengkulu	85	278	123.714	69.450	6.425
8.	Lampung	325	1.963	114.280	14.665	44.875
9.	DKI Jakarta	2.449	14.287	140.832.613	112.666.069	73.003
10.	Jawa Barat	686	5.587	2.926.542	1.777.723	9.165.241
11.	Jawa Tengah	1.699	6.629	117.174.251	1.999.870	5.577.220
12.	DI. Yogyakarta	339	1.451	54.132	45.272	68.684
13.	Jawa Timur	1.692	6.433	809.977	167.810	261.492
14.	Kalimantan Selatan	333	1.071	1.183.107	348.952	142.796
15.	Kalimantan Barat	20	50	93.712	74.969	5.000
16.	Kalimantan Tengah	83	302	321.710	46.460	3.833
17.	Kalimantan Timur	110	873	92.400	26.400	51.185
18.	Sulawesi Selatan	291	1.387	1.563.641	287.467	394.991
19.	Sulawesi Tenggara	108	256	234.700	92.610	68.920
20.	Sulawesi Tengah	179	1.074	328.399	168.909	822.401
21.	Sulawesi Utara	436	1.402	1.993.064	1.178.857	294.401
22.	Bali	658	2.018	1.073.748	11.496	58.505
23.	Nusa Tenggara Barat	314	964	371.797	124.043	221.523
24.	Nusa Tenggara Timur	172	403	344.900	69.225	1.755
25.	Timor Timur	20	56	55.125	6.300	21.500
26.	Maluku	556	2.931	3.325.089	1.998.108	1.209.704
27.	Irian Jaya	80	364	2.908.000	2.561.250	171.200
	Jumlah	13.352	63.923	285.727.484	129.212.073	25.649.783

No.	Propinsi	Jumlah		Nilai (x Rp. 1000,-)		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Bahan Baku	Investasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	350	1,164	561.134	267.951	54.078
2.	Sumatera Utara	4.091	5.871	804.554	305.025	220.315
3.	Sumatera Barat	1.776	4.527	1.453.102	485.818	97.009
4.	Riau	10	20	13.300	800	3.000
5.	Jambi	135	155	193.200	2.720	3.665
6.	Sumatera Selatan	2.795	3.451	374.720	197.050	21.440
7.	Bengkulu	118	197	196.100	3.080	15.195
8.	Lampung	231	580	192.662	98.280	31.766
9.	DKI Jakarta	148	942	21.422.211	4.141.777	1.667.800
10.	Jawa Barat	581	1.972	2.073.257	8.710	13.250
11.	Jawa Tengah	1.343	3.510	2.639.528	1.319.560	1.479.250
12.	DI. Yogyakarta	1.187	3.250	861.404	226.974	249.904
13.	Jawa Timur	936	1.900	172.307	123.891	52.217
14.	Kalimantan Selatan	3.675	13.191	1.166.194	431.195	21.103
15.	Kalimantan Barat	105	541	123.450	15.550	10.500
16.	Kalimantan Tengah	533	1.739	1.003.555	334.854	32.313
17.	Kalimantan Timur	85	292	166.167	58.278	11.722
18.	Sulawesi Selatan	859	1.523	540.330	169.905	58.731
19.	Sulawesi Tenggara	108	495	87.700	43.200	9.855
20.	Sulawesi Tengah	316	640	1.748.705	868.534	679.521
21.	Sulawesi Utara	1.634	2.307	3.119.680	896.130	87.265
22.	B a l i	4.450	4.812	852.223	558.000	479.832
23.	Nusa Tenggara Barat	5.636	11.306	751.363	335.016	329.832
24.	Nusa Tenggara Timur	174	262	44.346	21.640	20.042
25.	Timor Timur	73	161	120.100	38.427	6.152
26.	Maluku	176	880	364.470	104.996	54.550
27.	Irian Jaya	88	185	356.650	178.834	25.900
	J u m l a h	31.613	65.873	41.402.412	11.236.195	5.735.728

No.	Propinsi	Jumlah		Nilai (x Rp. 1000,-)		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Bahan Baku	Investasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	74	262	123.158	61.548	20.575
2.	Sumatera Utara	368	1.379	3.544.053	1.413.820	242.304
3.	Sumatera Barat	207	877	1.057.256	344.840	58.550
4.	Riau	113	355	179.085	20.446	44.935
5.	Jambi	34	102	48.042	14.910	15.850
6.	Sumatera Selatan	434	1.387	449.510	244.236	177.634
7.	Bengkulu	154	365	1.699.720	842.300	655.625
8.	Lampung	85	287	1.961.430	80.600	27.610
9.	DKI Jakarta	335	963	2.869.312	1.289.220	1.116.400
10.	Jawa Barat	695	3.858	3.570.051	1.445.491	88.865
11.	Jawa Tengah	691	2.606	3.816.528	1.535.475	296.900
12.	DI. Yogyakarta	492	2.333	3.137.200	1.254.513	1.744.111
13.	Jawa Timur	813	2.983	2.172.488	888.845	63.366
14.	Kalimantan Selatan	80	501	650.534	215.823	51.940
15.	Kalimantan Barat	88	315	285.220	148.120	96.100
16.	Kalimantan Tengah	32	175	167.049	71.137	9.500
17.	Kalimantan Timur	29	79	205.500	75.595	8.088
18.	Sulawesi Selatan	356	1.068	90.882	36.367	42.230
19.	Sulawesi Tenggara	152	514	630.765	277.150	57.050
20.	Sulawesi Tengah	61	319	512.601	268.300	41.000
21.	Sulawesi Utara	273	904	957.657	249.812	27.703
22.	B a l i	183	339	126.900	18.745	43.850
23.	Nusa Tenggara Barat	212	348	493.951	329.958	86.682
24.	Nusa Tenggara Timur	149	301	279.400	111.680	86.682
25.	Timor Timur	10	20	12.000	4.800	4.500
26.	Maluku	156	571	229.420	91.678	52.770
27.	Irian Jaya	35	103	88.439	31.000	79.595
	J u m l a h	6.311	23.314	28.358.131	11.366.409	5.166.388